

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ASEAN, *Association of South East Asian Nations*, adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Semboyannya adalah *One Vision, One Identity, One Community*. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Keanggotaan resmi ASEAN saat ini terdiri dari sepuluh negara setelah keanggotaannya diperluas mencakup Brunei pada (Januari 1984), Vietnam, Laos dan Myanmar pada (Juli 1997), kemudian Kamboja (April 1999) (ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama, 2011).

Prosedur untuk menjadi anggota tetap adalah mengirimkan permohonan secara resmi. Setelah aplikasi keanggotaan tetap disampaikan ke ASEAN *Chair*. Prosedur selanjutnya ditentukan oleh KTT ASEAN atau ASEAN *Summit* dan ASEAN *Coordinating Council*. Setelah semua prosedur dilakukan secara resmi dan ada keputusan dari KTT maka pengajuan aplikasi keanggotaan itu diterima sesuai pasal 6 dalam ASEAN *Charter*. Proses seperti itulah yang dialami oleh negara-negara ASEAN (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) saat bergabung di akhir tahun 1990-an. Negara-negara menyesuaikan reposisi politik domestik dan penyesuaian politik internasionalnya diselaraskan dengan prinsip dan kebijakan umum ASEAN (Thuzar, 2017).

Secara umum, kepentingan nasional Timor Leste di ASEAN adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Dalam hal ekonomi, Timor Leste

berkepentingan untuk mengamankan kebutuhan dalam negerinya dengan mencari alternatif produk yang terjangkau dari Negara-negara ASEAN ataupun juga partner dagang ASEAN seperti Cina. Produk yang terjangkau akan banyak membantu pemerintah Timor Leste dalam menekan anggaran belanja negaranya per tahun sehingga bisa dialokasikan ke pos lain seperti pendidikan atau kesehatan ataupun untuk membuka lapangan kerja baru.

Asistensi dari Negara-negara ASEAN juga merupakan hal yang dicari Timor Leste dalam rangka membantu Negara itu untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang baik dengan ditopang oleh lembaga-lembaga Negara yang demokratis dan patuh hukum. Kedua bidang ini, yakni ekonomi dan politik merupakan tujuan utama mengapa Timor Leste ingin bergabung ke ASEAN. Dalam jangka panjang, apa yang diharapkan oleh Timor Leste terhadap ASEAN adalah stabilitas ekonomi, politik dan juga keamanan dalam negeri yang berikutnya akan mempengaruhi stabilitas kawasan sehingga Timor Leste mampu membangun negaranya dengan lebih baik lagi untuk menjadi Negara yang lebih makmur, sejahtera, adil dan aman dimasa yang akan datang.

Aplikasi pengajuan menjadi anggota resmi Timor Leste diajukan pada 2011 yang langsung diberikan Menteri Timor Leste kala itu, Zacarius Da Costa kepada Menteri Marty Natalegawa yang saat itu mewakili Indonesia setelah pertemuan ke-5 Komisi Bersama Tingkat Menteri RI-Timor Leste pada tahun 2011(Kedubes Indonesia di Ottawa, 2011). Artinya dapat dilihat bahwa Timor Leste dalam mengajukan aplikasi penerimaannya diawali dengan meminta restu dari Indonesia selaku kerabat terdekatnya, tentu hal ini menjadi wajar karena

Timor Leste sempat menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang mana tentu secara kultur hubungan Timor Leste paling dekat dengan Indonesia.

Dukungan Indonesia terhadap upaya Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN memiliki arti penting bagi keberhasilan dan kemajuan Timor Leste. Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Indonesia telah menegaskan dukungannya, demikian pula dengan DPR. Pimpinan DPR saat menerima kunjungan Guterres ke DPR kembali menegaskan bahwa Indonesia akan mendukung penuh pencalonan Timor Leste dalam keanggotaan ASEAN. Dukungan dari Indonesia yang memiliki latar belakang sejarah cukup panjang dengan Timor Leste, jelas mempengaruhi sikap negara anggota ASEAN lainnya (Roza, 2018).

Berbeda dengan sikap Singapura yang menolak aplikasi Timor Leste di ASEAN. Penolakan Singapura sendiri dibenarkan oleh Penasehat ASEAN, Edmund Sim yang mengatakan bahwa *“Basically, 9 of 10 ASEAN member support the immediate start of negotiations for Timor Leste to join ASEAN. Singapore does not”*. Singapura sebagai negara yang mempunyai ekonomi kuat di Asia Tenggara tentu melihat masuknya Timor Leste ditinjau dari segi aspek ekonomi. Dalam Pilar Ekonomi sendiri, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia memainkan peran penting dalam mempercepat produktivitas. Karena untuk mempercepat produktivitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki basis pendidikan umum yang tinggi, memiliki keterampilan yang sesuai yang dapat terus ditingkatkan agar tetap relevan mengikuti perkembangan zaman dan permintaan akan barang dan jasa.

Di dalam proses dan dinamika sejak Timor Leste menawarkan diri bergabung ASEAN, Indonesia menjadi negara yang paling mendukung Timor Leste bergabung ASEAN (Suastha, 2018) dan sebaliknya Singapura menjadi negara yang belum menerima Timor leste untuk bergabung ASEAN karena menilai kondisi domestik negara Timor Leste yang belum siap (Wuryandari). Untuk itulah dalam penelitian ini penulis akan meneliti alasan dan keputusan kedua negara tersebut dalam menilai kelayakan Timor Leste bergabung ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan proses Masuknya Timor Leste ke dalam Keanggotaan resmi ASEAN tentu mendapat tanggapan dari anggota resmi ASEAN, dalam konteks ini Indonesia dan Singapura yang diwujudkan dengan perbedaan sikap kedua Negara tersebut. Untuk itu dalam tulisan ini akan mengkaji **Bagaimana Perbandingan Proses Pembuatan Keputusan Terkait Keinginan Timor Leste Bergabung ASEAN oleh Indonesia dan Singapura.?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dibuat bertujuan untuk :

1. Menganalisis perbandingan sikap Indonesia dan Singapura dalam menentukan aplikasi penerimaan Timor Leste menjadi anggota resmi ASEAN
2. Untuk mengetahui instrumen yang digunakan oleh Indonesia dan Singapura sehingga melandasi perbedaan sikap kedua Negara tersebut.

3. Tulisan ini juga diharapkan mampu menambah sudut pandang kajian dan diskursus tentang Timor Leste yang selama ini minim literturnya.

1.4 Signifikansi

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk memberikan analisa dalam terhadap perbedaan sikap Indonesia dan Singapura terkait aplikasi Timor Leste menjadi kenggoataan resmi ASEAN. Artinya status observer yang selama ini menjadi kualifikasi Timor Leste apakah masih relevan ataukah mampu naik tingkat menjadi Anggota Resmi. Kacamata inilah yang ingin peneliti mendalami sehingga mampu dipahami alasan mengapa terjadinya perbedaan sikap Indonesia dan Singapura.

Tulisan ini menjadi menarik karena berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan segala prosesnya tentu barangkali mempengaruhi sikap dari Negara-negara ASEAN dalam menentukan proposal Timor Leste untuk bergabung menjadi anggota resmi ASEAN, mengingat Timor Leste masih berumur muda sehingga hal tersebut menjadi evaluasi Timor Lester dalam berbenah diri untuk siap bergabung ASEAN.

Penelitian ini menjadi menarik karena sangat minimnya penelitian-penelitian lain yang membahas isu ini. Apalagi dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran tentang perbedaan sikap negara Indonesia dan Singapura dalam menilai proposal Timor Leste bergabung ASEAN. Penulis juga menganalisa kondisi dalam negeri Timor Leste terkait kesiapan negara

tersebut bergabung ASEAN. Dalam proses analisa tersebutlah yang menjadikan penelitian ini lebih komprehensif dan menarik.

1.5 Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu cakupan penelitian memberikan upaya dalam menentukan konsep atau pendekatan dari suatu permasalahan, sehingga berbagai permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dipahami dengan baik. Lebih lanjut bahwa pokok permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tentunya harus dibatasi dengan sedemikian rupa.

Hal ini dilakukan agar peneliti mampu menginterpretasikan hasil penelitiannya sesuai dengan pokok permasalahan dan menghindari kerancuan terhadap objek yang diamati. Oleh karena itu ruang lingkup dari penelitian ini yaitu analisa mengenai perbedaan sikap Indonesia dan Singapura terhadap aplikasi Timor Leste menjadi anggota resmi ASEAN. Perbedaan sikap inilah didasari dengan kapabilitas *power* Timor Leste yang ditandai dengan sub-sub bab yang akan penulis sajikan di pembahasan penelitian ini. Maka dari itu pentingnya data-data dari negara Timor Leste sebagai bahan dalam diskursus perbedaan sikap Indonesia dan Singapura.

1.6 Tinjauan Pustaka

Secara umum penelitian ini akan memfokuskan pada analisa perbedaan sikap Singapura dan Indonesia dalam menerima proposal bergabungnya Timor Leste menjadi anggota resmi ASEAN. Peneliti berusaha untuk mencoba mengidentifikasi berbagai literature atau kajian-kajian yang membahas keterlibatan kedua negara tersebut, terutama dalam kepentingan dan alasan kedua Negara tersebut dalam menyikapi proposal bergabungnya Timor Leste menjadi anggota tetap ASEAN.

Semangat ini berpengaruh hingga ke di Timor Portugis. Hasrat untuk merdeka rakyat Timor Portugis begitu bergelora, namun berbagai dinamika yang terjadi antara melepaskan diri menjadi Negara berdaulat atau bergabung NKRI maka dibentuklah partai politik untuk mencapai proses tersebut. Partai politik di Timor Portugis ada UDT, ASDT yang kemudian menjelma menjadi Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente), dan terakhir ada Apodeti,. Singkat cerita terjadilah konflik antara UDT fretilin dan Apodeti, perbedaan antara mereka atas tujuan perjuangan mereka adalah penyebab konflik itu, Fretilin ingin merdeka murni, UDT ingin merdeka tetapi tetap menginduk ke Portugis, sedang Apodeti sebagai parpol ingin bergabung dengan Indonesia (Coelho, 2013).

Timor-Leste sudah miskin selama pendudukan Indonesia atas negara itu. Misalnya, antara 31 dan 42 persen penduduk Timor Lorosae memiliki pendapatan di bawah kemiskinan garis pada tahun 1996, dibandingkan dengan rata-rata antara 11 dan 18 persen di Indonesia. Kemiskinan Timor Timur berhubungan dengan tingkat pendidikan yang rendah, tingkat buta huruf dan angka kematian yang tinggi, dan akses yang buruk ke perawatan kesehatan dan sosial lainnya. jasa. Timor-Leste berbeda dari sebagian besar wilayah miskin di Asia di mana kemiskinan biasanya terkait dengan tekanan populasi yang terlalu tinggi pada tanah dan

tingginya tingkat ketidak-hadiran. Kemiskinan di Timor-Leste lebih disebabkan oleh buruknya kualitas tanah dan kurangnya akses ke pasar domestik dan internasional (Booth, 2003).

Untuk itu negara yang ingin menjadi anggota ASEAN harus terlebih dahulu menjadi observer atau negara pengamat agar mengetahui mekanisme, prinsip dan nilai yang dijalankan dalam ASEAN. Penetapan keanggotaan di ASEAN dibahas dan disepakati sebagai konsensus bersama dalam sidang tertinggi atau yang dikenal Konferensi Tingkat Tinggi dan diresmikan melalui upacara penerimaan khusus. Mekanisme pengambilan keputusan (konsensus) ini dilakukan agar menjaga solidaritas dan konsensus sebagai permufakatan bersama dalam setiap keputusan karena pada hakikatnya negara anggota ASEAN adalah setara satu sama lain (Frost, 1997).

Aplikasi pengajuan menjadi anggota resmi Timor Leste diajukan pada 2011 yang langsung diberikan Menteri Timor Leste kala itu, Zacarius Da Costa kepada Menteri Marty Natalegawa yang saat itu mewakili Indonesia setelah pertemuan ke-5 Komisi Bersama Tingkat Menteri RI-Timor Leste pada tahun 2011 (Kedubes Indonesia di Ottawa, 2011). Presiden Timor Leste juga mengungkapkan kesungguhannya terkait proposal Timor Leste bergabung dengan ASEAN dengan mengatakan *"we wish to join ASEAN in the possible shortest time"* (Yusoff, 2009).

Artinya dapat dilihat bahwa Timor Leste dalam mengajukan aplikasinya diawali dengan meminta restu dari Indonesia selaku kerabat terdekatnya, tentu hal ini menjadi wajar karena Timor Leste sempat menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang mana tentu secara kultur hubungan Timor Leste paling dekat dengan Indonesia. Hal ini berdampak positif karena Indonesia selalu mendukung Timor Leste untuk bergabung ASEAN (Suastha, 2018).

Namun berbeda dengan Indonesia, menurut Ganewati Wuryandari (Wuryandari) Singapura belum sepenuhnya menerima keanggotaan Timor Leste menjadi anggota ASEAN karena kondisi perekonomian Timor Leste yang lebih rendah di bawah negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV), kekhawatirannya jika menerima Timor Leste justru ASEAN akan melangkah kebelakang padahal ASEAN sedang memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Di antara literatur-literatur belum ada tulisan yang menyajikan dinamika dan analisa proses pengambilan keputusan negara anggota ASEAN dalam menyikapi permohonan Timor Leste bergabung ASEAN, Lebih spesiknya dalam literatur-literatur yang penulis temukan belum ada tulisan yang fokus mengkaji perbedaan-perbedaan sikap negara anggota ASEAN dalam menilai kelayakan Timor Leste ASEAN. Untuk itulah menjadikan penilitan ini menarik sehingga akan memberikan sumbangan yang berharga dalam dialektika akademis.

1.7 Landasan Konseptual

a. *Rational Choice Theory (Decision-Making)*

Decision making atau pembuatan keputusan adalah terbagai menjadi dua fungsi yaitu *decision* dan *making*. *Decision* atau keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus secara efisien. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil (Dagun, 2006, p. 185). J.Reason, Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses

mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia (Reason, 1990). Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.

Salah satu teori pembuatan keputusan digagas oleh William D. Coplin. Menurut teori tersebut, adalah kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan hasil dari tiga pertimbangan yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap pengambil kebijakan. Coplin menjelaskan dalam bukunya;

“To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision.... On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision maker state. The first is the domestic politics within the foreign policy decision makers state; the second is the economic and military capability of the state; the third is the international context the particular position in which his state finds itself especially in relation to other state in sistem.” (Azizah, 1992, p. 365).

Penjelasan diatas diatas dapat digambarkian; Pertama, kondisi politik dalam negeri; Kedua, kemampuan ekonomi dan militer; ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional. Sebagai pertimbangan pertama, kondisi politik dalam negeri meliputi interaksi di antara para aktor yang mempengaruhi kebijakan (*policy influencers*), yang terdiri atas birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan massa.

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, Coplin menekankan pada tiga indikator. Pertama, peran kelompok kepentingan, partai politik dan birokrat sebagai aktor yang paling berperan dalam sistem pengaruh kebijakan di level politik dalam negeri. Sistem pengaruh kebijakan dalam suatu negara merupakan interaksi antara para pengambil keputusan dengan para *policy influencers*. Lebih lanjut Coplin menjelaskan, kelompok kepentingan memiliki peran yang lebih besar dalam negara dengan sistem politik yang terbuka seperti Australia. Meskipun demikian, tidak dapat diasumsikan bahwa kelompok kepentingan selalu menjadi penentu utama desain dan arah kebijakan ekonomi luar negeri sebuah negara. Sebaliknya, dalam sebuah negara bersistem politik terbuka juga memungkinkan kelompok kepentingan memiliki peran yang terbatas dalam menggunakan pengaruh. Gambaran yang sama juga terlihat dari peran partai politik dalam Negara bersistem politik terbuka.

Kedua, kekuatan ekonomi dan militer, dapat dipahami bahwa Coplin menekankan beberapa aspek dalam kedua kekuatan tersebut. Pada kekuatan ekonomi, aspek yang dimaksud meliputi perkembangan kondisi ekonomi, kapasitas produksi nasional serta ketergantungan suatu negara pada perdagangan internasional. Sejarah perkembangan kondisi ekonomi dinilai berperan besar dalam mempengaruhi arah kebijakan ekonomi luar negeri, khususnya dalam mengukur kapasitas produksi komoditas ekspor. Analisis terhadap kedua aspek ini menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap perdagangan internasional. Pada kekuatan militer, Coplin menekankan peran kapasitas penggunaan kekuatan militer serta ketergantungan keamanan nasional terhadap aktor luar negeri, dimana keduanya dinilai memiliki pengaruh dalam membentuk arah politik luar negeri suatu negara.

Ketiga, memperlihatkan dimensi yang berbeda dari pertimbangan pertama dan kedua. Bila politik dalam negeri dan kekuatan ekonomi serta militer adalah bagian dari dinamika dalam

negeri suatu negara, maka konteks internasional sebagai pertimbangan ketiga merupakan dimensi luar negeri yang berperan dalam memberikan pengaruh terhadap politik luar negeri. Sifat konteks internasional yang diwarnai dengan hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem internasional menentukan bagaimana suatu negara akan berperilaku. Dalam menjelaskan pertimbangan ini, Coplin menekankan tiga aspek yang terdiri atas aspek geografis, ekonomi dan politik.

Kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan antar negara, serta keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antar-pemerintah. Demikian halnya dengan aspek ekonomi yang merupakan bagian penting dalam konteks internasional. Arus barang dan jasa maupun arus modal menciptakan pola ketergantungan suatu negara terhadap Negara lain. Selain itu, aspek politik yang digambarkan dengan hubungan politis antarnegara juga berperan besar dalam politik luar negeri suatu negara. Menurut Coplin aliansi keamanan dapat berdampak besar terhadap anggota maupun non-anggota aliansi dalam perumusan politik luar negeri.

Ketiga pertimbangan di atas memiliki peran yang saling berkesinambungan dalam mempengaruhi pertimbangan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Konteks dalam negeri yang terdiri atas politik dalam negeri, kekuatan ekonomi dan militer berperan bersama dengan konteks internasional dalam membentuk kebijakan atau arah politik luar negeri. Ketiga pertimbangan tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Politik luar negeri sebagai output dari pendekatan Coplin ini mencakup fokus analisis yang luas, dari kebijakan yang terkait dengan hukum dan keamanan internasional hingga kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara. Lebih mudh, Coplin menegaskan bahwa politik internasional adalah perilaku dan komitmen suatu negara terhadap isu-isu internasional.

Dalam kondisi tersebut, kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional tertentu oleh suatu negara.

Gambar I.1
Pengambilan Kebijakan



Sumber : (Coplin,1971)

Untuk itu dalam hal ini penelitian, teori *Rational Choice (decision making)* tepat untuk digunakan. Hal ini disebabkan teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan alasan sebuah negara mengeluarkan kebijakan atau keputusan. Dalam konteks penelitian ini Indonesia sebagai aktor negara yang menerima keanggotaan Timor Leste bergabung ASEAN dan Singapura sebagai aktor negara yang menolak keanggotaan Timor Leste bergabung ASEAN, keputusan kedua negara tersebut akan dilihat dari tiga indikator pertimbangan yang ada dalam teori rational

choice yaitu; a.) *Kondisi politik dalam negeri*; b.) *Kondisi ekonomi dan militer*; c.) *Konteks internasional*. Adapun aplikasi tersebut adalah sebagai berikut;

a. *Kondisi Politik Dalam Negeri*

Dalam aspek ini, kondisi politik dalam negeri mempengaruhi keputusan Indonesia untuk melakukan menerima keanggotaan Timor Leste. Adapun aspek politik dalam negeri meliputi kelompok kepentingan, partai politik dan birokat sebagai aktor yang paling berperan dalam sistem pengaruh kebijakan di level politik dalam negeri. Sehingga penelitian ini akan melihat aspek-aspek kelompok kepentingan, partai politik, birokrat dan media massa yang mendorong bergabungnya Timor Leste ke ASEAN.

b. *Kondisi Ekonomi dan Militer*

Dalam aspek ini, kondisi ekonomi dan militer Indonesia dan Singapura mempengaruhi keputusan kedua negara untuk menerima (Indonesia) dan menolak (Singapura). Dengan demikian hal ini mengharuskan peneliti mencari tahu mengenai kondisi ekonomi dan militer Indonesia pada periode tertentu.

c. *Konteks Internasional*

Aspek konteks Internasional berusaha mempertimbangkan kondisi internasional yang mendorong terjadinya perbedaan Indonesia dan Singapura menilai proposal bergabungnya Timor Leste ke ASEAN.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang kenyataan di antara berbagai faktor atau berbagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis deskriptif yang berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci mengenai objek penelitian (Casterle, 2012) yaitu Analisis Perbandingan Sikap Indonesia Dan Singapura Terhadap Keinginan Timor-Leste Menjadi Anggota Asean.

2. Subjek Penelitian

Subjek yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah Indonesia dan Singapura, adapun maksud dari Indonesia dan Singapura sebagai subjek penelitian

Karena kedua negara adalah negara besar di ASEAN dan paling keras menerima dan menolak bergabungnya Timor Leste ke ASEAN. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Timor Leste karena kondisi stabilitas nasional timor leste dan kesiapannya yang menjadi landasan negara Singapura dan Indonesia dalam memberikan sikap

3. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan atau studi literatur yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen yang disajikan

dalam buku-buku, jurnal, dan berbagai artikel yang memuat tentang informasi yang juga berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini (Corbin, 1998).

4. Proses Penelitian

Tahap awal dalam menganalisis data adalah pengumpulan data yang telah didapatkan oleh peneliti yang memuat informasi mengenai objek penelitian. Dalam proses pengumpulan data kualitatif adalah data yang berupa perilaku atau fenomena, dan sikap yang diperoleh peneliti. Langkah kedua setelah proses pengumpulan data, penulis mencoba untuk membaca keseluruhan data atau informasi yang bertujuan untuk memahami ide-ide atau gagasan yang tersirat dalam data dan perlu diketahui dalam tahap pengumpulan data, peneliti juga mencatat informasi penting untuk melakukan kategorisasi.

Langkah ketiga dalam penelitian ini adalah melakukan pemetaan (*coding*) terhadap data-data yang diperoleh penulis, Tahapan ini juga dapat dikatakan sebagai tahapan reduksi data yang berarti bagian dari kegiatan analisis, sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang diinventaris, mana yang harus dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang berkembang dan semua itu merupakan pilihan-pilihan yang analitis.

Artinya dengan proses tersebut mampu memudahkan penulis untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan proses verifikasi. Langkah keempat yang dilakukan penulis adalah mengembangkan narasi yang didasarkan atas kategorisasi data atau informasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Sekaligus tahap terakhir adalah hasil deskripsi terhadap temuan-temuan yang diperoleh ketika proses pengembangan narasi dan dalam tahap ini peneliti juga mencoba untuk melakukan interpretasi terhadap berbagai

temuan dari penelitian ini. Dengan sistematika ini penulis berharap dalam proses penelitian dapat berjalan komprehensif dan efisien.

